

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hafidhuddin, D. (2002). *“Zakat dalam perekonomian modern. Indonesia”* Gema Insani.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- J. Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Narbukodan Abu Achmadi, Cholid. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Noor, Juliansyah. 2017. *METODOLOGI PENELITIAN: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Santoso, Djonet, *“Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan”*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 4.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syatori Nasehuddien, Toto. 2006. *Diktat Metodologi Penelitian*. Cirebon: Dept. RI, SekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Wibisono, Y. (2015). *“Mengelola zakat Indonesia: diskursus pengelolaan zakat nasional dari rezim Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 ke rezim Undang-Undang no. 23 tahun 2011”*. Indonesia: Kencana.

JURNAL

- Firmansyah, M. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional Devisa*. Jurnal Manajemen. 3(2).
- Michiko Labesi, Thereza. 2013. “*Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance di PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado*”. Dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 4, Desember 2013.
- Nurazizah, R. A., & Fajriyah, N. 2019. *Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jawa Timur dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional*.
- Priyatno, D., & Wahyuni, E. 2018. “*The Implementation of Strategic Plan and Its Impact on Performance in Financial Service Companies in Indonesia*”. *Academy of Strategic Management Journal*. 17(2).
- Suryaningtyas, Rahma. 2018. “*Analysis of BAZNAZ Tangerang District Performance*”. In *International Journal of Zakat*. Vol. 3(2).
- Yulinarti, Adella Lagareta Iswanto, Suwarno. 2020. “*Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Tingkat Kepuasan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember*”. Dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Januari-Juni 2020. Vol 9(1).
- Mulyati, S., Purnomo, Y. W., & Rusyadi, A. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 64-76.
- Wulandari, E. R., Sulistyanto, A., & Dwijayanti, E. (2020). *Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten Bantul*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 173-186.

WEBSITE

2022. “Ketua BAZNAS Tangerang Menyayangkan Kasus yang Menimpa ACT” <https://beritatangerang.id/ketua-baznas-kota-tangerang-menyayangkan-kasus-yang-menimpa-act/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 12.32 WIB.

2022. “Laporan Keuangan BAZNAS”. <https://baznas.tangerangkota.go.id/>. Diakses pada 29 Desember 2022, pukul 06.33 WIB.
2023. “QS At Taubah Ayat 103”, <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pkl. 20.45 WIB.

SKRIPSI

- Almas, Mahyuddina. 2021. “Implementasi Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember”. (Skripsi IAIN Jember, 2021).
- Fahmi Baehaqi, Reza. 2021. “*Analisis Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Daarul Qur'an Berlandaskan PSAK 109 dalam Penguatan Prinsip Good Corporate Governance*”. (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

SUMBER LAIN

- Firmansyah. “Implementasi Good Governance Corporate di BAZNAS Kota Tangerang”. Wawancara dengan penulis di Kantornya. Tanggal 17 Februari 2023.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 perihal Tata Cara Pelaksanaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Perihal Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menjelaskan Tujuan Wawancara.
2. Menanyakan Identitas Narasumber.
3. Gambaran Prinsip Good Corporate Governance di Baznas Kota Tangerang?
4. Kendala dalam menerapkan Good Corporate Governance di Baznas Kota Tangerang?
5. Kendala yang banyak terjadi pada SDM yang ada.
6. Banyaknya pelatihan yang diikuti oleh staf pegawai baznas, dari yang gratis hingga berbayar.
7. Adakah kemungkinan penambahan program bantuan dari baznas kota tangerang?
8. Bagaimana cara menghitung dengan pendekatan indek zakat nasional?
9. Adakah intervensi kepada baznas kota tangerang?
10. Adakah perbedaan pelayanan dari para muzzaki, dari muzzaki perorangan ataupun muzzaki badan(instansi)?
11. Bagaimana Baznas bisa memastikan tepat sasaran dalam memberikan bantuannya?
12. Harapan dari bapak (Jaka Firmansyah) untuk Baznas kedepannya?

Lampiran 2

Foto-foto Wawancara



Wawancara dengan bapak Jaka Firmansyah

Lampiran 3

Skoring Dimensi Makro dan Mikro

Dimensi Makro						
No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Regulasi Nasional	Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat di <25% provinsi	Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat sekurang-kurangnya di 25% provinsi	Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat sekurang-kurangnya di 50% provinsi	Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat sekurang-kurangnya di 75% provinsi	Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung di tingkat nasional serta memiliki Perda zakat di seluruh provinsi
2	Regulasi Daerah (untuk penghitungan level provinsi) *	Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat di <25% kab/kota di provinsi tersebut.	Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat sekurang-kurangnya di 25% kab/kota di provinsi tersebut	Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat sekurang-kurangnya di 50% kab/kota di	Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat sekurang-kurangnya di 75%	Memiliki Perda zakat di tingkat provinsi dan Perda zakat di seluruh kab/kota di provinsi tersebut

				provinsi tersebut	kab/kota di provinsi tersebut	
3	APBN untuk BAZNAS	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS <20%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurangnya 20%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurangnya 30%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurangnya 50%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurangnya 75%
4	APBD untuk BAZNAS daerah (Untuk Penghitungan level provinsi)	APBD untuk BAZNAS daerah (Untuk Penghitungan level provinsi)	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah <20%	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurangnya 30%	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurangnya 50%	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurangnya 75%
5	Jumlah Lembaga Zakat Resmi, Muzaki, dan Mustahik	Tidak memiliki database dari jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan	Memiliki 1 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki 2 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga serta peta persebarann

		mustahik per lembaga		per lembaga	lembaga	ya
6	Rasio Jumlah Muzaki Individu terhadap Jumlah Rumah Tangga Nasional	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional <1%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional 1-3.9%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional 4-6.9%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional 7-10%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga nasional >10%
7	Rasio Jumlah Muzaki Badan terhadap Jumlah Badan Usaha Nasional	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha <1%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 1- 1.9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 2-2.9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 3-3.9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha $\geq 4\%$

Keterangan:

Khusus tingkat kabupaten/kota, keberadaan perda pengelolaan zakat akan membuat nilai indeks regulasi sama dengan 1 (satu), dan ketiadaan perda pengelolaan zakat akan membuat nilai indeks regulasi sama dengan 0 (nol).

Dimensi Mikro

No	Variabel	Kriteria				
		(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Penghimpunan	Pertumbuhan (YoY) <5%	Pertumbuhan (YoY) 5-9%	Pertumbuhan (YoY) 10-14%	Pertumbuhan (YoY) 15-19%	Pertumbuhan (YoY) >20%
2	Pengelolaan	Tidak memiliki SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan	Memiliki sekurang-kurangnya 1 dari SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan	Memiliki sekurang-kurangnya 2 dari SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan	Memiliki sekurang-kurangnya 3 dari SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan	Memiliki SOP pengelolaan zakat, rencana strategis, sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan
3	Penyaluran*	ACR <20%	ACR 20-49%	ACR 50-69%	ACR 70-89%	ACR ≥90%
		PS >12 bulan	PS 9-12 bulan	PS 6-<9 bulan	PS 3-<6 bulan	PS <3 bulan
		PE >15 bulan	PE 12-15 bulan	PE 9-<12 bulan	PE 6-<9 bulan	PE <6 bulan
		Tidak ada anggaran untuk PD	PD minimal dialokasikan 0.1 - <2.5 % anggaran	PD minimal dialokasikan 2.5-<7.5 % anggaran	PD minimal dialokasikan 7.5-< 10% anggaran	PD minimal dialokasikan ≥ 10% anggaran
4	Pelaporan	Tidak memiliki laporan	Memiliki laporan keuangan	Memiliki laporan keuangan	Memiliki laporan keuangan	Memiliki laporan

		keuangan	yang tidak teraudit	teraudit tidak WTP	teraudit WTP dan publikasi pelaporan berkala	keuangan teraudit WTP, memiliki laporan audit syariah dan publikasi pelaporan secara berkala
5	Indeks Kesejahteraan CIBEST (W)	Nilai Indeks 0 – 0.20	Nilai Indeks 0.21 – 0.40	Nilai Indeks 0.41 – 0.60	Nilai Indeks 0.61 – 0.80	Nilai Indeks > 0.80
6	Modifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Nilai Indeks 0 – 0.20	Nilai Indeks 0.21 – 0.40	Nilai Indeks 0.41 – 0.60	Nilai Indeks 0.61 – 0.80	Nilai Indeks > 0.80
7	Kemandirian	Tidak memiliki pekerjaan dan usaha/bisnis	Memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan)	Hanya memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis	Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis dan memiliki tabungan	Memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan

Keterangan:

ACR = Allocation to Collection Ratio, PS = Program Sosial (Konsumtif),

PE = Program Ekonomi (Produktif), PD = Program Dakwah

Definisi:

Program Sosial

Program penyaluran zakat yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang bersifat mendesak dan jangka pendek (al-hajah al-massah) serta bersifat karitatif, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.

Program Ekonomi

Program penyaluran zakat yang bersifat pemberdayaan dan bertujuan untuk membekali mustahik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada jangka panjang.

Program Dakwah

Program penyaluran zakat yang menitikberatkan pada penguatan dakwah dan mental spiritual mustahik, termasuk program advokasi dalam kerangka pembelaan terhadap kepentingan mustahik, serta upaya penyadaran masyarakat secara keseluruhan yang disertai dukungan aktif dalam pembangunan zakat nasional.